



SISTEM EKONOMI SOSIAL CAMPURAN (KONSEP, BENTUK, DAN VARIASI DI NEGARA BERKEMBANG)

Helmayanti^{1*}, Eva Naila², & Erwan Setyanoor³

*¹⁻³ Institut Agama Islam Darul Ulum Kandangan

*e-mail: yantihelmayantii@gmail.com

Submit Tgl: 16-Januari-2026 Diterima Tgl: 17- Januari-2026 Diterbitkan Tgl: 20- Januari-2026

Abstract: *The mixed social economic system is an economic system that combines positive elements of capitalist and socialist systems with the aim of minimizing the weaknesses of each. This article seeks to examine the concept, forms, and variations in the implementation of the mixed social economic system in developing countries. The research method employed is a literature review, analyzing various relevant books, scholarly articles, and scientific journals. The findings indicate that the mixed social economic system positions market mechanisms as the primary driver of economic activity while still assigning an important role to the government in regulation, wealth distribution, provision of public services, and management of strategic sectors. Variations in the implementation of this system in developing countries are influenced by social and political conditions as well as the level of economic development of each country, as seen in the cases of the Nordic countries, China, and Vietnam. The mixed social economic system is considered capable of promoting economic growth while maintaining social stability, although it still faces various challenges such as efficiency limitations, potential policy misuse, and unclear boundaries between the roles of government and the private sector. Therefore, the mixed social economic system represents a relevant alternative for developing countries in achieving sustainable societal welfare.*

Keywords: Mixed Economic System; Developing Countries

Abstrak: Sistem ekonomi sosial campuran merupakan sistem perekonomian yang mengombinasikan unsur-unsur positif dari sistem ekonomi kapitalis dan sosialis dengan tujuan meminimalkan kelemahan masing-masing sistem. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji konsep, bentuk, serta variasi penerapan sistem ekonomi sosial campuran di negara-negara berkembang. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan menganalisis berbagai literatur, buku, dan jurnal ilmiah yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa sistem ekonomi sosial campuran menempatkan mekanisme pasar sebagai penggerak utama kegiatan ekonomi, namun tetap memberikan peran penting kepada pemerintah dalam regulasi, distribusi kekayaan, penyediaan layanan publik, serta pengelolaan sektor-sektor strategis. Variasi penerapan sistem ini di negara berkembang dipengaruhi oleh kondisi sosial, politik, dan tingkat pembangunan ekonomi masing-masing negara, sebagaimana terlihat pada kasus negara-negara Nordik, Tiongkok, dan Vietnam. Sistem ekonomi sosial campuran dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga stabilitas sosial, meskipun masih menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan efisiensi, potensi penyalahgunaan kebijakan, dan ketidakjelasan batas peran antara pemerintah dan swasta. Dengan demikian, sistem ekonomi sosial campuran menjadi alternatif yang relevan bagi negara berkembang dalam mencapai kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Sistem Ekonomi Campuran; Negara Berkembang

Cara mengutip Helmayanti, Naila, E., & Setyanoor, E. (2026). Sistem Ekonomi Sosial Campuran (Konsep, Bentuk, dan Variasi di Negara Berkembang). *Surplus: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 4(2), 206–216. <https://doi.org/10.71456/sur.v4i2.1610>

PENDAHULUAN

Istilah *ekonomi* memiliki akar historis yang panjang dan bermakna mendalam. Secara etimologis, kata “*ekonomi*” berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu *oikonomia*, yang tersusun atas dua kata, *oikos* yang berarti rumah tangga atau kepemilikan dan *nomos* yang berarti hukum atau pengelolaan (Aristotle, 1998). Pengertian ini menunjukkan bahwa sejak awal ekonomi dipahami sebagai upaya mengatur sumber daya dalam suatu rumah tangga agar tercipta keteraturan dan kesejahteraan. Dalam konteks masyarakat kuno, ekonomi tidak dipisahkan dari nilai moral dan sosial, melainkan menjadi bagian dari tata kehidupan bersama yang diatur oleh norma dan kebiasaan yang berlaku.

Seiring dengan perkembangan peradaban dan meningkatnya kompleksitas kehidupan manusia, makna ekonomi mengalami perluasan. Ekonomi tidak lagi terbatas pada pengelolaan rumah tangga, tetapi berkembang menjadi ilmu yang mempelajari bagaimana individu dan masyarakat membuat pilihan dalam kondisi keterbatasan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas (Samuelson & Nordhaus, 2010). Dalam kerangka ini, ekonomi berperan penting dalam menentukan arah pembangunan, distribusi pendapatan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, ekonomi tidak dapat dilepaskan dari struktur sosial, politik, dan budaya yang membentuk perilaku ekonomi suatu masyarakat (Deliarnov, 2014).

Dalam konteks negara, ekonomi diwujudkan melalui suatu sistem yang dikenal sebagai sistem ekonomi. Sistem ekonomi dapat dipahami sebagai cara atau strategi suatu negara dalam mengatur kegiatan ekonomi masyarakatnya dengan tujuan mencapai kemakmuran bersama (Mankiw, 2016). Sistem ini mencakup pengaturan mengenai apa yang diproduksi, bagaimana cara memproduksi, dan untuk siapa hasil produksi tersebut didistribusikan. Dengan demikian, sistem ekonomi tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga normatif karena mencerminkan pilihan nilai dan ideologi yang dianut oleh suatu negara.

Sebagai sebuah sistem sosial, sistem ekonomi mengandung unsur-unsur yang saling berkaitan. Salah satu unsur utama adalah adanya tujuan bersama yang ingin dicapai, yaitu kesejahteraan dan keadilan sosial. Tujuan ini kemudian melahirkan kebiasaan, tradisi, kaidah, dan aturan yang dilembagakan dalam kehidupan ekonomi masyarakat (Sukirno, 2015). Selain itu, sistem ekonomi juga memuat seperangkat nilai yang melekat pada tujuan bersama tersebut, seperti nilai keadilan, efisiensi, dan solidaritas sosial, yang berfungsi sebagai pengikat dan pedoman bagi anggota masyarakat dalam melakukan aktivitas ekonomi (Deliarnov, 2014).

Unsur penting lainnya dalam sistem ekonomi adalah sikap dasar dan pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban ini mengatur relasi antara individu dengan individu, individu dengan negara, serta negara dengan masyarakat secara keseluruhan. Dalam sistem ekonomi tertentu, hak kepemilikan individu dapat menjadi sangat dominan, sementara dalam sistem lainnya peran negara lebih menonjol dalam mengatur dan mengendalikan kegiatan ekonomi demi kepentingan bersama (Mankiw, 2016).

Pandangan mengenai sistem ekonomi sebagai suatu kesatuan yang kompleks juga dikemukakan oleh Gregory Grossman. Dalam Rahardja dan Manurung (2004), Grossman menjelaskan bahwa sistem ekonomi merupakan sekumpulan komponen atau unsur yang

terdiri atas unit-unit ekonomi, agen-agen ekonomi, serta lembaga-lembaga atau institusi ekonomi yang saling menopang dan saling memengaruhi. Unit-unit ekonomi tersebut meliputi rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah, sedangkan institusi ekonomi mencakup aturan hukum, kebijakan publik, serta norma sosial yang mengatur interaksi ekonomi. Hubungan timbal balik antarkomponen inilah yang membentuk dinamika suatu sistem ekonomi.

Pemahaman ini menegaskan bahwa sistem ekonomi tidak dapat dipandang secara parsial. Setiap perubahan kebijakan, nilai, atau institusi ekonomi akan berdampak pada keseluruhan sistem. Dalam praktiknya, berbagai sistem ekonomi berkembang di dunia, seperti sistem ekonomi kapitalis, sosialis, dan sistem ekonomi campuran. Perbedaan sistem tersebut mencerminkan perbedaan pandangan mengenai peran pasar, negara, dan masyarakat dalam mengelola sumber daya ekonomi (Todaro & Smith, 2020). Oleh karena itu, kajian tentang sistem ekonomi menjadi penting untuk memahami bagaimana suatu masyarakat mengorganisasikan kehidupan ekonominya dalam upaya mencapai kemakmuran dan keadilan sosial.

MOTODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research). Metode ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk mengkaji konsep, karakteristik, serta variasi sistem ekonomi sosial campuran berdasarkan kajian teoretis dan empiris yang telah ada.

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder, berupa buku teks ekonomi, jurnal ilmiah nasional dan internasional, laporan penelitian, serta publikasi resmi yang relevan dengan sistem ekonomi kapitalis, sosialis, dan ekonomi sosial campuran. Literatur tersebut diperoleh melalui penelusuran database jurnal, perpustakaan digital, dan sumber akademik terpercaya.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan menelaah berbagai referensi yang berkaitan dengan konsep sistem ekonomi sosial campuran, bentuk penerapannya, serta variasinya di negara berkembang seperti negara Nordik, Tiongkok, dan Vietnam. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif-kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan, membandingkan, dan menafsirkan informasi yang diperoleh untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Sistem Ekonomi Sosial Campuran

Sistem ekonomi campuran (“Mixed economy”) merupakan panduan dari dua bentuk sistem ekonomi sosialisme dan kapitalisme. Usaha penyatuan ini dilakukan untuk menyerap elemen-elemen yang positif dan dinamis dari keduanya. Sistem ini hendak dibangun dengan usaha untuk meninggalkan unsur-unsur lemah dari dua bentuk sistem ekonomi politik tersebut. Sejarah pertentangan yang keras dan bahkan tidak harmonis dari kapitalisme dan sosialisme telah menstimulasi pemikir-pemikir untuk mencari bangun ekonomi dengan ciri dasar, yang merupakan gabungan unsur-unsur terbaik dari keduanya.

Dasar munculnya sistem perekonomian ini disebabkan adanya dampak buruk sistem ekonomi sosialis. Dampak buruk tersebut adalah penyitaan kekayaan individu

menjadi kekayaan negara. Di lain sisi, sistem ekonomi kapitalis membawa dampak buruk bagi negara dimana yang kaya akan semakin kaya dan yang miskin semakin miskin.

Oleh karena itu, dipilih jalan tengah untuk menyatukan kebaikan sistem ekonomi kapitalisme dan sistem ekonomi sosialis. Dengan dipersatukannya ke dua sistem perekonomian ini, negara berfungsi sebagai pengawas dan pengambil kebijakan alam hal pengurangan pengangguran dan pemerataan distribusi pendapatan.

Sistem ekonomi campuran dikenal dengan istilah sistem ekonomi Keynes yang diharapkan melahirkan negara yang Sejahtera (Welfare State). Menurut Hamid (2018), welfare state adalah negara yang ingin mengimplementasikan demokrasi seluas-luasnya terutama pembukaan lapangan pekerjaan yang besar, penguasaan teknologi, pemerataan Pendidikan.

Sistem ekonomi campuran adalah sistem yang mengandung beberapa elemen dari sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis. Seperti telah dikatakan sebelumnya, sekarang ini tidak ada satupun (terkecuali di Korea Utara) Negara yang menerapkan sistem ekonomi sosialis atau kapitalis 100 %. Jadi, sistem ini merupakan “campuran” antara kedua sistem ekonomi tersebut diatas, dengan berbagai variansi kadar dominasinya.

Sistem ekonomi campuran adalah kombinasi dari elemen-elemen sistem ekonomi pasar dan sistem ekonomi terencana. Dalam konteks sistem ekonomi campuran, terdapat campuran antara pasar bebas yang mengandalkan mekanisme pasar dan inisiatif swasta dengan intervensi pemerintah yang mengarah pada regulasi dan distribusi sumber daya (Constantino, 2018).

Mekanisme pasar masih tetap memegang peranan penting dalam menentukan corak kegiatan ekonomi Yang dilakukan masyarakat. Di dalam sistem campuran ini, tujuan campur tangan Pemerintah adalah untuk menghindari akibat-akibat yang kurang menguntungkan dari pada sistem pasar bebas.

Campur tangan Pemerintah dalam perekonomian dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) bentuk, yaitu:

1. berupa peraturan-peraturan yang bertujuan untuk mengatur dan mengawasi kegiatan ekonomi agar dijalankan dalam norma-norma yang wajar. Peraturan ini dipandang sebagai rule of the game atau aturan permainan daripada kegiatan-kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat.
2. berupa secara langsung melakukan kegiatan ekonomi. Di Indonesia campur tangan Pemerintah itu cukup luas yang dibuktikan clengan banyaknya perusahaan yang dimiliki oleh negara.
3. Dengan melakukan kegiatan fiscal (kebijakan mengubah pajak dan pengeluaran pemerintah) dan kebijakan moneter (mengatur dan mengawasi kegiatan sektor keuangan) dengan tujuan agar perekonomian dapat berkembang dengan pesat tanpa mengalami inflasi.

Bentuk sistem ekonomi campuran sering juga menggunakan nama sosialis atau sosialisme, walau bukan sosialis atau sosialisme ekstrem/radikal; misalnya komunisme yang meletakkan individu di bawah subordinasi kelas, dan fasisme yang meletakkan individu bawah subordinasi Negara atau sosialis murni Karl Marx.

Dalam pandangan lain, sistem ekonomi kita juga dikenal dengan sistem ekonomi kerakyatan dan ada juga yang sering menamakan dengan Sistem Ekonomi Pancasila (SEP). SEP tidak liberal-kapitalistik, juga bukan sistem ekonomi yang etastik. Meskipun demikian sistem pasar tetap mewarnai kehidupan perekonomian.

Sistem ekonomi campuran adalah sistem ekonomi yang berusaha mengurangi kelemahan-kelemahan yang timbul dalam sistem ekonomi terpusat dan sistem ekonomi pasar dimana pemerintah dan swasta saling berinteraksi dalam memecahkan masalah ekonomi. Akibatnya, peran pemerintah dan swasta sangat besar. Adapun ciri khas dari sistem ekonomi campuran adalah pemerintah mempunyai kekuasaan penuh terhadap SDA.

Dalam pelaksanaannya sistem ekonomi campuran memiliki kelebihan di antaranya:

1. Kegiatan ekonomi antara swasta dan pemerintah terpisah secara jelas;
2. Kegiatan ekonomi yang dilakukan swasta dan pemerintah sama-sama menguntungkan;
3. Kegiatan ekonomi yang dilakukan swasta terikat oleh aturan yang dibuat pemerintah;
4. Penggunaan faktor-faktor produksi, terutama tenaga kerja diatur dalam undang-undang ketenagakerjaan.
5. Kestabilan ekonomi terjamin
6. Pemerintah dapat memfokuskan perhatian untuk memajukan sektor usaha menengah dan kecil
7. Adanya kebebasan berusaha dapat mendorong kreativitas individu
8. Hak milik individu atas sumber produksi diakui walaupun ada pembatasan.
9. Lebih mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi

Kelemahan sistem ekonomi campuran:

1. Sulit menentukan batas antara kegiatan ekonomi yang seharusnya dilakukan pemerintah dan swasta
2. Sulit menentukan batas antara sumber produksi yang dapat dikuasai oleh pemerintah dan swasta.
3. Berpotensi Terjadinya Suap Karena pemerintah sepenuhnya mengatur kebijakan, bukan tidak mungkin pelaku usaha yang memiliki modal besar melakukan suap kepada pemerintah untuk melancarkan usahanya.
4. Keuntungan yang Didapat Pihak Swasta Tidak Maksimal Hal ini menjadi salah satu kelemahan dari sistem ekonomi campuran karena pihak swasta akan dibatasi keuntungannya dengan kebijakan dari pemerintah, misalnya dengan pemberlakuan pajak.
5. Produksi Terbatas Aturan dari pemerintah dapat mengatur jumlah produksi yang ada. Sehingga kemungkinan produksi yang seharusnya bisa lebih besar, akan dibatasi jumlahnya melalui kebijakan dari pemerintah.
6. Walaupun peran pemerintah sangat besar, tetapi masalah ekonomi seperti inflasi, pengangguran, dan lainnya masih akan muncul dan berkembang.
7. Pertumbuhan ekonomi cenderung melambat daripada dengan sistem ekonomi pasar (liberal).

Bentuk Sistem Ekonomi Sosial Campuran

Cara kerja mixed economy system merupakan kombinasi dari market economy dan command economy. Jadi, ciri-ciri sistem ekonomi campuran pun adalah gabungan dari karakteristik sistem ekonomi lain.

Sistem ini mencoba memanfaatkan kelebihan keduanya, menciptakan suatu model yang diharapkan dapat menggabungkan efisiensi pasar dengan pertimbangan sosial dan

distribusi kekayaan yang lebih adil. Berikut adalah beberapa karakteristik dari sistem ekonomi campuran:

1. Kepemilikan Campuran

Sumber daya dan faktor produksi dapat dimiliki baik oleh sektor swasta maupun oleh pemerintah. Beberapa sektor, terutama yang dianggap strategis atau vital, mungkin dimiliki oleh pemerintah, sementara sektor-sektor lainnya dapat dimiliki oleh individu atau perusahaan swasta.

2. Pasar dan Harga Ditentukan oleh Permintaan dan Penawaran

Pasar masih memainkan peran penting dalam menentukan harga barang dan jasa. Mekanisme pasaran memungkinkan interaksi antara permintaan dan penawaran untuk menetapkan harga secara relatif.

3. Regulasi Pemerintah

Pemerintah terlibat dalam merumuskan kebijakan dan regulasi yang memastikan adanya persaingan yang sehat, melindungi konsumen, dan menjaga stabilitas ekonomi. Hal ini mencakup regulasi harga, standar kualitas, dan perlindungan konsumen.

4. Intervensi Pemerintah dalam Distribusi Kekayaan

Pemerintah dapat terlibat dalam redistribusi kekayaan melalui kebijakan pajak progresif, program kesejahteraan, dan upaya-upaya lain untuk mengurangi ketidaksetaraan ekonomi.

5. Tujuan Sosial dan Ekonomi

Sistem ekonomi campuran mencoba untuk mencapai tujuan-tujuan ekonomi dan sosial sekaligus. Tujuan ini dapat mencakup pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (Lundvall, 2016).

6. Kebebasan Ekonomi dan Swasta

Individu dan perusahaan masih memiliki kebebasan untuk berusaha dan berinvestasi. Swasta tetap berperan dalam kegiatan ekonomi, termasuk berpartisipasi dalam produksi dan distribusi barang dan jasa.

7. Pendidikan dan Kesehatan Umum

Pemerintah dapat memiliki peran aktif dalam penyediaan layanan pendidikan dan kesehatan untuk memastikan 10 Sistem Ekonomi Indonesia akses yang lebih merata dan meningkatkan kapasitas manusia.

8. Pasar Tenaga Kerja yang Fleksibel

Pasar tenaga kerja dapat bersifat fleksibel, di mana hubungan antara pekerja dan pengusaha dapat ditentukan oleh mekanisme pasar, tetapi pemerintah juga dapat melibatkan diri dalam melindungi hak-hak pekerja dan memastikan kondisi kerja yang layak.

Variasi Sistem Ekonomi Sosial Campuran di Negara Berkembang

Sebagian besar negara dapat digolongkan sebagai negara yang memiliki sistem ekonomi campuran yang menggabungkan unsur-unsur ekonomi pasar dan ekonomi terencana. Misalnya, di beberapa negara, kepemilikan perusahaan didominasi oleh sektor swasta untuk beberapa industri, sementara pemerintah memiliki dan mengendalikan banyak industri lain, seperti produksi energi, ekstraksi mineral, dan transportasi.

Dalam ekonomi campuran, pemerintah berperan dalam mengatur bisnis swasta untuk menegakkan praktik persaingan, kesejahteraan sosial, perlindungan lingkungan, dan sebagainya.

Kritik umum terhadap ekonomi campuran berkisar pada apakah intervensi pemerintah terlalu banyak atau terlalu sedikit, dan apakah lembaga swasta atau publik paling cocok untuk menyediakan barang dan jasa tertentu, seperti layanan kesehatan dan sumber daya alam.

Abad kedua puluh adalah periode transformasi signifikan dalam hubungan geopolitik dan struktur sosial-ekonomi di tingkat global. Paruh pertama abad ini penuh gejolak dengan dua perang besar. Perang Dunia Kedua diikuti oleh Perang Dingin selama beberapa dekade, di mana dunia pada dasarnya terbagi antara negara-negara kapitalis dan sosialis dan ketegangan antara kedua sistem ini meningkat, terutama dengan munculnya rezim sosialis di beberapa bagian Asia dan Amerika Latin Sementara prinsip-prinsip kapitalis umumnya berlaku, khususnya di negara-negara maju tetapi juga di sebagian besar negara berkembang, gagasan sosialis dapat ditemukan di seluruh masyarakat kapitalis, dalam bentuk perawatan kesehatan universal, sekolah umum yang didanai oleh pajak, dan berbagai program kesejahteraan lainnya. Seperti yang telah kita bahas, semua negara modern memiliki campuran perusahaan milik negara dan swasta, bersama dengan pasar dan perencanaan ekonomi.

Sebagaimana dibahas di atas, tidak ada ekonomi dunia nyata yang memiliki sistem kapitalis murni atau sistem sosialis murni. Semua ekonomi modern dapat dianggap sebagai sistem campuran dengan kecenderungan ke arah pasar atau perencanaan, dan ke arah kepemilikan pribadi atau sosial. Meskipun kami telah memilih contoh negara tertentu sebagai representasi dari berbagai sistem di sini, kategorisasi ini tentu saja dapat diperdebatkan.

Misalnya, Swedia sering diidentifikasi sebagai negara kapitalis dengan demokrasi sosial karena ketergantungannya pada pertukaran pasar dan dominasi kepemilikan modal swasta, meskipun sektor publiknya besar. Namun, kami mengkategorikannya sebagai contoh sosialisme pasar karena negara kesejahteraannya yang dermawan yang menyediakan layanan kesehatan universal dan pendidikan tinggi, dan sektor pemerintah yang besar yang mempekerjakan lebih dari seperempat populasi pekerjanya.

Demikian pula, Tiongkok mengidentifikasi sistem ekonominya sebagai 'sosialisme dengan karakteristik Tiongkok'. Namun, mengingat perluasan sektor pasar yang berkelanjutan di samping kendali pemerintah yang kuat atas semua aspek ekonomi, kami mengkategorikan sistem tersebut sebagai kapitalisme negara.

Kategorisasi Amerika Serikat sebagai contoh kapitalisme pasar dan bekas Uni Soviet sebagai contoh sosialisme terencana tidak terlalu kontroversial mengingat kedua sistem ini sangat selaras dengan karakteristik utama masing-masing sistem seperti dibahas di bawah ini.

Dalam kapitalisme pasar, barang dan jasa terutama didistribusikan melalui pasar tanpa perencanaan pemerintah, dan alat-alat produksi sebagian besar dimiliki oleh swasta. Di antara berbagai sistem ekonomi yang dijelaskan di atas, kapitalisme pasar umumnya beroperasi dengan keterlibatan pemerintah paling sedikit dalam kegiatan ekonomi.

Metrik yang paling umum untuk menilai tingkat keterlibatan pemerintah dalam suatu perekonomian adalah belanja pemerintah atau penerimaan pajak sebagai bagian dari PDB. Secara umum, negara-negara berkembang memiliki tingkat pengeluaran pemerintah yang lebih rendah, seringkali kurang dari 20 persen PDB. Perlu dicatat bahwa pengeluaran pemerintah belum tentu merupakan ukuran akurat untuk tingkat keterlibatan pemerintah dalam suatu perekonomian karena tidak memperhitungkan tingkat regulasi dan kendali pemerintah.

Seperti yang telah kami sebutkan sebelumnya, hampir semua perekonomian modern dapat dianggap sebagai varian dari sistem ekonomi campuran. Beberapa perekonomian campuran yang condong ke arah sosialisme pasar modern umumnya memiliki kebijakan iklim yang lebih progresif dan dampak lingkungan yang relatif baik. Misalnya, semua negara Nordik telah menetapkan target ambisius untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, mengenakan pajak karbon untuk sektor-sektor tertentu, dan mempromosikan kebijakan energi bersih.

Vietnam telah mencapai pembangunan sosial-ekonomi yang mengesankan selama 35 tahun terakhir. Dari salah satu negara termiskin pada pertengahan 1986, Vietnam telah menjadi negara berpenghasilan menengah ke bawah pada tahun 2010. Selain pertumbuhan ekonomi yang termasuk tertinggi di dunia, indikator sosial lainnya seperti pendidikan, perawatan kesehatan, dan akses ke layanan dasar (listrik, air bersih, dan fasilitas sanitasi) telah meningkat secara signifikan. Dari ekonomi tertutup dan diembargo pada tahun 1986, Vietnam telah menjadi salah satu ekonomi paling terbuka di dunia saat ini.

Sejak 1986, Vietnam telah mencari model pertumbuhan optimal yang dapat mempercepat pembangunan sosial-ekonominya, sementara Partai Komunis Vietnam (PKV) yang sedang berkembang dapat mempertahankan kekuasaannya dan mencapai tujuan sosialismenya. "Ekonomi pasar sosialis", yang telah terbukti cukup berhasil di Tiongkok, tampaknya cocok dengan Vietnam setelah banyak perdebatan sengit dan diskusi hati-hati di antara para pemimpin Partai. Pada Kongres IX CPV tahun 2001, "ekonomi pasar sosialis"

penelitian tentang ekonomi pasar sosialis di Vietnam penting tidak hanya bagi Vietnam tetapi juga bagi negara-negara lain. Terdapat beberapa penelitian tentang topik ini. Konsep "sosialisme" mengacu pada masyarakat yang beradab dan berkeadilan di mana negara mewakili kepentingan jangka panjang bangsa.

Neubart & Roeckel menggambarkan proses dinamis transisi ekonomi Vietnam dan mengilustrasikan konsep ekonomi pasar sosialisnya. Para penulis membahas sejauh mana pengaruh ideologis sosialis terhadap kinerja pertumbuhan negara yang mengesankan dan arah masa depannya. Alih-alih mengalami transisi linear keluar dari sosialisme, Vietnam justru mengalami transformasi sosialisme yang sangat beragam dan kompleks.

Nghia menunjukkan bahwa meskipun Konstitusi Vietnam 2013, yang mengandung benih jaminan politik dan hukum di masa depan untuk perlindungan kebebasan individu, gagal meletakkan fondasi bagi reformasi kelembagaan komprehensif yang luas karena ambiguitas dalam hal kepemilikan rakyat atas tanah dan sumber daya alam.

Hansen dkk. berpendapat bahwa model ekonomi pasar sosialis di Tiongkok, Vietnam, dan Laos berkinerja lebih baik dibandingkan sistem ekonomi negara-negara dengan tingkat pendapatan per kapita yang sama pada berbagai indikator pembangunan

Ekonomi pasar sosialis tidak mewakili model yang mudah ditransfer dan ditiru ke negara lain. Model pembangunan Vietnam telah diberi label sebagai "pasar-Leninisme", "kapitalisme negara dengan orientasi Leninis" dan merupakan contoh lain dari developmentalisme negara Asia.

Pendapat Para Ahli Mengenai Sistem Ekonomi Sosial Campuran

Salah satu pemikiran Hegel ini menarik untuk disimak begaimana dasar pemikiran mengapa muncul sistem ekonomi campuran sebagai alternatif dari sistem yang bertentangan. Jika hal itu terjadi, maka keduanya memiliki kelemahan mendasar sehingga

cara terbaik adalah menggabungkannya untuk mengejar ketertinggalan negara-negara sedang berkembang. Adalah Hegel yang menemukan fenomena dialektik sebagai suatu teori ini ditemukan oleh kelompok idealisme dalam pasca Kantian dan mengalami masa puncaknya dalam pemikiran filosofi Hegel.

Dialektik itu sendiri pernah diajukan oleh Immanuel Kant sebagai suatu logika dari penalaran terhadap alam dan fenomena dunia untuk memberikan pengesahan yang transenden. Hegel kemudian menginterpretasikan dialektik sebagai operasionalisasi dari penalaran, tanpa kaitan dengan hal yang transeden. Sebab alam dan isinya bersifat realistik, bukan sesuatu yang abstrak. Ini memberikan kenyataan lebih benar dan lebih mendalam dibandingkan dengan pemikiran analitis kontradiksi sebagai hasil dari perpaduan ide-ide, yang dapat dicapai melalui cara sintesa untuk menghasilkan pengetahuan lebih benar. Proses sintesa meningkat, kemudian menjadi alasan utama terwujudnya sistem ekonomi campuran, yang merupakan perpaduan dari sistem kapitalisme dan Marxisme. Hal ini tidak seperti Karl Marx yang mengadopsi dialektik sebagai pembenturan kelas di dalam wejahan, yang selalu saling berhadapan satu sama lain.

Argumen yang dapat dikemukakan mengenai sistem ekonomi campuran yang dinilai tidak ideal adalah adanya sifat keserakahan manusia yang tidak hanya menyebabkan utilitarianisme yang berlebihan sebagaimana dikemukakan oleh Chapra (2000: 26), tetapi juga menimbulkan dominasi yang terlalu besar dari sektor publik atau sektor swasta yang pada akhirnya merugikan semua pihak. Bahkan, keserakahan dapat mendorong terjadinya kolusi antara pemerintah dan sektor swasta yang dalam jangka pendek, menurut Santosa (2014: 162), justru melanggengkan kemiskinan, pengangguran, ketimpangan ekonomi, kerusakan lingkungan, serta memunculkan berbagai patologi sosial.

Argumen lainnya adalah adanya nilai lebih dalam ajaran Islam yang tidak hanya mengajarkan sistem ibadah, tetapi juga berbagai sistem kehidupan, termasuk sistem ekonomi. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Al-‘Assal dan Karim (1980: 10) serta Bashir (1987: 1) dalam bentuk sistem ekonomi Islam yang bersifat rahmatan lil ‘aalamiin dan mampu menghilangkan sifat keserakahan manusia, yang berbeda dengan sistem ekonomi kapitalisme dan sosialisme sebagaimana dikemukakan oleh Qardhawi (1995: 18–21).

Berdasarkan kedua pendapat tersebut, penulis lebih condong pada pandangan kontra terhadap sistem ekonomi campuran. Meskipun secara filosofis sistem ini dapat dipahami sebagai hasil sintesis dialektis antara kapitalisme dan sosialisme sebagaimana dijelaskan dalam pemikiran Hegel, pendekatan tersebut lebih bersifat konseptual dan belum sepenuhnya mampu menjawab realitas praktik ekonomi. Dalam penerapannya, sistem ekonomi campuran justru berpotensi melestarikan kelemahan mendasar dari kedua sistem asalnya, terutama karena adanya sifat keserakahan manusia yang mendorong utilitarianisme berlebihan serta dominasi yang tidak seimbang antara sektor publik dan swasta.

Kondisi ini membuka ruang terjadinya kolusi antara pemerintah dan pelaku ekonomi yang pada akhirnya merugikan masyarakat luas dengan melanggengkan kemiskinan, pengangguran, ketimpangan ekonomi, kerusakan lingkungan, dan berbagai patologi sosial. Selain itu, sistem ekonomi campuran dinilai kurang memiliki landasan etika yang kuat, berbeda dengan sistem ekonomi Islam yang tidak hanya mengatur aspek teknis perekonomian, tetapi juga membentuk moral pelaku ekonomi dan berorientasi

pada kemaslahatan universal. Oleh karena itu, sistem ekonomi campuran dipandang belum mampu menyelesaikan persoalan ekonomi secara mendasar dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Sistem ekonomi sosial campuran merupakan sistem perekonomian yang menggabungkan unsur-unsur utama dari sistem ekonomi kapitalis dan sosialis dengan tujuan memaksimalkan kelebihan serta meminimalkan kelemahan dari kedua sistem tersebut. Dalam sistem ini, mekanisme pasar tetap berperan penting dalam menggerakkan kegiatan ekonomi, sementara pemerintah memiliki fungsi strategis sebagai pengatur, pengawas, dan pelaksana kebijakan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan keadilan sosial.

Hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan sistem ekonomi sosial campuran di negara-negara berkembang memiliki variasi yang berbeda-beda, tergantung pada kondisi sosial, politik, dan tingkat pembangunan ekonomi masing-masing negara. Peran pemerintah dalam sistem ini mencakup pengelolaan sektor-sektor strategis, penyediaan layanan publik, serta intervensi melalui kebijakan fiskal dan moneter untuk mengatasi permasalahan ekonomi seperti pengangguran, ketimpangan pendapatan, dan inflasi.

Meskipun sistem ekonomi sosial campuran memiliki berbagai kelebihan, seperti mendorong pertumbuhan ekonomi, menjamin kestabilan, serta memberikan ruang bagi kebebasan berusaha, sistem ini juga menghadapi sejumlah kelemahan, antara lain sulitnya menentukan batas peran antara pemerintah dan swasta serta potensi ineffisiensi dan penyalahgunaan kebijakan. Oleh karena itu, keberhasilan sistem ekonomi sosial campuran sangat bergantung pada kualitas tata kelola pemerintahan, kebijakan yang tepat, serta keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan tujuan sosial dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung Riyadi, P. B. (2015). Analysis Of Mixed Economic System In Islamic Perspective. *Journal of Economic and Policy*, 127.
- Amirudin, A. K. (2019). Macam-macam sistem ekonomi dan kemerosotan sistem ekonomi syariah (ekonomi syariah di dalam dunia global). *Al-Huquq*, 72.
- Bhudianto, W. (2012). Sistem Ekonomi Kerakyatan Dalam Globalisasi Perekonomian . *Trasformasi*, 2.
- Dyah Supriyatno, A. F. (2022). *Perekonomian indonesia*. Pemalang: Tiga cakwarala.
- Fitria, I. (2024). *Pengantar Sistem Ekonomi* . Jawa Timur: UMSIDA.
- Harjono, D. K. (2011). Konsep pembangunan hukum dan perannya terhadap sistem ekonomi pasar. *Jurnal Hukum* .
- Hermanita. (2021). *Perekonomian indonesia* . Lampung: IKAPI.
- Initiative, E. i. (2021). *Comperative Economic Systems: Capitalism and Socialism in the 21st Century*. Boston: Global Development Policy Center, Boston University.
- Iskandar Chang. Heppi Syofya, A. F. (2024). *Sisstem ekonomi indonesia*. solok: PT. MAFY media literasi indonesia anggota IKAPI.

- Latifah, L., & Ngalimun, N. (2023). Pemulihan Pendidikan Pasca Pandemi Melalui Transformasi Digital Dengan Pendekatan Manajemen Pendidikan Islam Di Era Society 5.0. *Jurnal Terapung: Ilmu-Ilmu Sosial*, 5(1), 41-50.
- Latifah, L., Zwagery, R. V., Safithry, E. A., & Ngalimun, N. (2023). Konsep dasar pengembangan kreativitas anak dan remaja serta pengukurannya dalam psikologi perkembangan. *EduCurio: Education Curiosity*, 1(2), 426-439.
- Lailatul rofiah, D. A. (2024). *buku ajar pengantar ilmu ekonomi*. Jambi: PT. Sonpedia publishing indonesia.
- M, D. W. (2021). *sistem ekonomi*. Malang: PT. Leterasi Nusantara Abadi grup.
- Maruta, H. (2019). Sejarah sistem ekonomi. 652.
- Maruta, H. (n.d.). Sejarah Sistem Ekonomi. 652-653.
- Ngalimun, M. R., & Anwar, H. (2019). Komunikasi Bisnis Kewirausahaan Dalam Islam. *Para ma Ilmu*.
- Ngalimun, N. (2022). Bahasa Indonesia Untuk Penulisan Karya Ilmiah. *EduCurio: Education Curiosity*, 1(1), 265-278.
- Ngalimun, N., & Latifah, L. (2025). Pendidikan Sebagai Sebuah Investasi. *Surplus: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 3(2), 369–378.
- Nguyen, N. A. (2022). Understanding the socialist-market economy in vietnam. *Emerging Science journal*, 952.
- Salam, A. (2011). Interelasi antara etika dan ssistem ekonomi (studi pemikiran ekonomi ibnu khaldun. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 35.
- Santosa, I. (2013). *Perekonomian Indonesia: masalah potensi dan alternatif solusi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Siregar, A. H. (2015). *kelebihan dan kelemahan sistem ekonomi sosialis dan sistem ekonomi campuran* . Riau: Universitas riau.
- Supriyanto. (2009). memahami cara bekerja sistem perekonomian . *jurnal ekonomi & pendidikan*, 202.
- Usman, A. (2023). *Buku Ajar pengantar ilmu ekonomi teori dan aplikasi*. Makasar: PT. Nas media indonesia anggot IKAPI.